

Judul : Kasus Hambalang : DPR minta pertanggungjawaban
Tanggal : Selasa, 20 November 2012
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

Kasus Hambalang

DPR Minta Pertanggungjawaban

[JAKARTA] Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, hak bertanya (interpelasi) oleh DPR kepada pemerintah dalam pelaksanaan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, akan terus berjalan. DPR menghendaki adanya pertanggungjawaban pemerintah.

"Optimistis interpelasi Hambalang bisa. Beberapa fraksi sudah sepakat, kecuali Partai Demokrat. Secara masing-masing individu sudah bicara di media, rata-rata mendukung," kata Bambang, di Jakarta, Minggu (18/11).

Menurutnya, DPR sudah seharusnya menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR terhadap laporan audit investigasi BPK dalam kasus Hambalang. Maka, DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengajukan hak interpelasi mengenai perubahan proyek



Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (kiri), mantan Pimpinan KPK Bibit Samad Rianto (tengah), dan Pengacara Achmad Rifai, memberikan paparannya saat menjadi pembicara pada diskusi di Jakarta, Minggu (18/11).

tahun tunggal Hambalang menjadi tahun jamak senilai Rp 1,2 triliun.

"DPR sudah menerima laporan audit hambalang, rekomendasi BAKN ditindaklanjuti dengan membentuk pansus dengan agenda hak interpelasi. Presiden sebagai kepala pemerintah harus hadir, kare-

na harus dipertanyakan mengapa (proyek Hambalang) bisa sampai triliunan, dari yang nilainya miliaran?" ujarnya.

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto mengatakan, jika memang hasil audit investigasi BPK dalam proyek Hambalang telah

memenuhi alat bukti maka, KPK sudah sepatutnya menentukan tersangka baru kasus ini.

Jangan Banyak Bicara

Dia juga mengimbau, pimpinan KPK sekarang ini untuk tidak terlalu sering berbicara di depan publik mengenai penyidikan kasus korupsi. Pim-

pinan KPK sebagai penegak hukum harus berbicara berdasarkan fakta.

Penanganan kasus Hambalang juga menjadi sorotan praktisi hukum Ahmad Rivai. Dia mempertanyakan, pengembangan kasus tersebut yang hingga kini belum ada tersangka baru. Hal seperti itu mengganggu kredibilitas KPK.

Dia berpandangan, mengembangkan penanganan kasus Hambalang disebabkan tidak solidnya lima komisioner KPK. "Pimpinan KPK mengatakan tinggal menghitung hari menetapkan tersangka tetapi kenyataannya sampai saat ini belum juga. Dengan begitu, kredibilitas KPK dikorbankan. Pimpinan KPK tidak solid antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika menetapkan tersangka selalu terkendala dengan adanya kolektif-kolektif," katanya.

Seperti diketahui, mayoritas fraksi di DPR mendukung penggunaan hak interpelasi (bertanya) terkait proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat. [E-11/C-6]